

Makna Keadilan Dalam Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai

Anik Indah Sari¹, Jurana², Fikry Karim³, Selmita Paranoan⁴, Muhammad Ansar⁵
Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 04 Juni 2025

Revised: 28 Juli 2025

Accepted: 08 Agustus 2025

Keywords:

Bantuan Pangan Non Tunai, Dimensi Anggaran, Keadilan, Pelaksanaan Anggaran, Prinsip Keadilan

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



ABSTRACT

Alokasi anggaran publik selain mempertimbangkan kebutuhan publik, juga harus memenuhi prinsip keadilan, memastikan bahwa anggaran harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna keadilan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pangan non tunai oleh pemerintah di Desa Mensung, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Metode etnometodologi digunakan untuk menggali makna keadilan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pangan non tunai. Observasi dokumen anggaran bantuan pangan non tunai dan aktivitas pelaksanaan anggaran, serta wawancara mendalam dengan kepala desa, pengelola E-Warung sebagai penyalur bantuan, masyarakat penerima manfaat, dan pendamping sosial. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip keadilan dimaknai berasaskan aspek distribusi, aspek prosedur, dan aspek hasil. Adanya distribusi bantuan, mekanisme dan prosedur pemberian bantuan, serta manfaat dari penerima bantuan menjadi dasar prinsip keadilan. Dalam aspek distribusi belum mencerminkan keadilan karena masih minimnya keterlibatan masyarakat. Masih adanya kesenjangan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan, yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Begitu pula kebermanfaatannya dari perspektif penerima bantuan yang belum memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada kebijakan bantuan dana dari pemerintah dan pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran sebagai wujud pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Corresponding Author:

Anik Indah Sari

Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako,

Jl. Soekarno Hatta No. KM 9, Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

Email: anikindahsari219@gmail.com

PENDAHULUAN

Prinsip keadilan anggaran telah menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsive dan berkeadilan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan (Ferry & Ahrens, 2025), dalam konteks akuntansi sector public, dimensi keadilan anggaran mencakup keadilan distributive, keadilan procedural, dan keadilan interaksional yang membentuk struktur kelembagaan pengelolaan keuangan public. Implementasi prinsip keadilan tidak hanya melibatkan distribusi sumber daya, melainkan juga menunjukkan proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Perspektif akuntansi sector public menekankan pentingnya sistem informasi akuntansi yang mampu mengintegrasikan dimensi keadilan dalam setiap tahapan siklus anggaran, sementara itu pada akuntansi manajemen mengambil peran dalam menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang berkeadilan, terutama dalam alokasi sumber daya organisasi (Dow, et al. 2021; Kohimeyer, et al. 2014). Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan kejelasan mendalam yang menunjukkan bahwa keadilan anggaran berfungsi sebagai mediator antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial.

Dimensi keadilan dalam praktik anggaran semakin nyata yang ditunjukkan berdasarkan anggaran berkaitan dengan instrument kebijakan yang menentukan “siapa mendapat apa” dalam masyarakat (Parker, et al. 2014). Secara holistic menunjukkan bahwa keadilan anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi dana, melainkan pada keterlibatan legitimasi sosial dan kepercayaan public. Tanpa kerangka keadilan yang selaras, alokasi fiscal berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi dan menggerus kredibilitas pemerintahan. McDonald & McCandless (2021) menegaskan *social equity budgeting* memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan prinsip keadilan dalam setiap fase perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Dalam konteks reformasi

sector public, keadilan anggaran menjadi kunci untuk menciptakan *value for money* yang sejalan dengan aspirasi masyarakat (Soleimani, et al. 2024).

Kesenjangan antara desain kebijakan keadilan anggaran dengan praktik implementasi yang diterapkan, khususnya dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah secara signifikan diidentifikasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengungkapkan adanya *exclusion error* dan *inclusion error* yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan (Primanto, 2023). Penelitian terdahulu mengidentifikasi permasalahan ketidakmerataan bantuan sosial yang disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima dan kurangnya transparansi dalam prosedur penetapan sasaran (Suryawandi, et al. 2025; Lingtias & Yamin, 2024; Aryanti, et al. 2023; Mangile, et al. 2023). Kesenjangan ini semakin kompleks mengingat implementasi bantuan sosial melibatkan *multiple stakeholders* dengan kepentingan yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis dimensi keadilan anggaran yang diterapkan dalam konteks mikro desa, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik local.

Pendekatan etnometodologi interpretative yang menggali makna dimensi keadilan dalam konteks kehidupan sehari-hari pada pelaksanaan anggaran di tingkat desa menjadi kebaruan yang ditawarkan pada penelitian ini. Penelitian ini mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif konvensional dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pelaksanaan anggaran, layaknya BPNT (Saadah & Nugroho, 2023; Susanto & Hardiningsih, 2021; Azhar & Lubis, 2024), penelitian ini mengadopsi perspektif etnometodologi untuk berfokus pada aksi actor sosial dalam mengkonstruksi dan memaknai keadilan melalui interaksi sehari-harinya. Penelitian ini juga menghadirkan kontribusi substantive dengan mengeksplorasi praktik penganggaran di tingkat mikro desa yang masih belum banyak digali pada penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks desa Mensung yang memiliki karakteristik geografis, sosial dan institusional yang unik.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas pengungkapan makna pada dimensi keadilan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pangan non tunai di desa Mensung, melalui interpretasi berdasarkan pendekatan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat menjadi rujukan pemerintah desa lain dalam mengoptimalkan implementasi program bantuan sosial yang berkeadilan. Hasil penelitian juga dapat memperkaya diskursus akademik mengenai implementasi keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan public dan memberikan bukti empiris untuk pengembangan model teoritik *social equity budgeting* yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sosial-politik.

KAJIAN TEORI

Teori Ekuitas dalam Konsep Keadilan

Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya citanegara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia (Timon 2021)

Teori ekuitas seperti yang dikemukakan oleh Adams (1963) menekankan pada keadilan persepsi dalam relasi imbalan dan kontribusi di tempat kerja. Individu akan membandingkan rasio antara kontribusi (input) mereka terhadap hasil yang mereka terima (output) dengan rasio serupa yang dialami oleh orang lain. Jika mereka merasakan ketidakadilan dalam perbandingan ini, mungkin timbul ketidakpuasan yang mendorong mereka untuk mengembalikan keadilan, baik dengan meningkatkan output atau mengurangi input. Tiap orang membandingkan masukan dan hasil yang diterimanya dan ada kemungkinan tidak puas. Artinya, tiap orang membandingkan rasio masukan-keluaran (input-output) dengan orang lain dan apabila rasionya di bawah orang lain, maka

ada perasaan tidak puas. Perasaan itulah yang memicu atau memotivasi seseorang dalam salah satu atau kedua hal yaitu mencapai keadilan dan atau mengurangi ketidakadilan (Ahmadpour-Samani et al. 2022)

Dalam konteks pemerintahan desa, teori ekuitas Adams (1963) bisa diterapkan untuk memahami dinamika kepuasan dan motivasi aparatur serta warga desa dalam pembagian sumber daya dan pengakuan atas kontribusi mereka. Jika aparatur desa atau warga merasa bahwa ada ketidakseimbangan antara usaha yang mereka berikan dan penghargaan yang diterima, dibandingkan dengan orang lain, bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan, mempengaruhi kinerja dan partisipasi mereka dalam aktivitas desa. Ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam tata kelola desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Kebijakan pemerintahan desa seharusnya memiliki dan memenuhi unsur keadilan dalam orientasi dan penerapannya. Prinsip Equity Theory menyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan. Kepuasan tersebut bisa dilihat dari rasa adil (equity) atas suatu keadaan yang diberikan olehnya. Perasaan equity dan inequity atas suatu keadaan, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya (Fikri et al. 2023)

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat serius dimana suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kondisi fisik maupun ekonomi, kemiskinan juga sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti halnya pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia kemiskinan dan kerentanan pangan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Untuk itu, dalam menangani permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerjasama dan melakukan koordinasi yang optimal (Widiati 2023)

Salah satu ciri khas mentalitas masyarakat miskin adalah sikap pasif dan rendahnya tingkat percaya diri. Masyarakat yang terbiasa dengan keterbatasan materi cenderung merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas nasib mereka. Mereka beranggapan bahwa usaha untuk meraih kesuksesan adalah sia-sia atau terlalu sulit. Akibatnya, mereka cenderung menghindari peluang-peluang baru atau tidak memiliki motivasi untuk mencoba hal-hal yang berada di luar zona nyaman mereka. Masyarakat miskin seringkali lebih fokus pada memenuhi kebutuhan harian daripada merencanakan jangka Panjang (Muttaqin and Ismail 2023). Mentalitas ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melihat lebih jauh ke depan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Kurangnya perencanaan jangka panjang dapat menghasilkan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, di mana masyarakat terus menerus terjebak dalam upaya bertahan hidup sehari-hari.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana-rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013).

Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah manajemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010:71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat

(Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sinaga, 2013). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putra dkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013). Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran.

Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Anggaran dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan pengelolaan perencanaan strategis sebagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sektor publik tujuan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan dan manfaat yang prima kepada publik. Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi utama sebagai alat perencanaan, alat politik, alat kebijakan fiskal, alat komunikasi, alat pengendalian, alat koordinasi, alat evaluasi kerja, alat motivasi, dan alat desain ruang publik dimana keberadaannya tidak bisa diabaikan oleh organisasi sektor publik (Anggraeni, Erina, and Effendi 2020)

Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian dukungan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas dari pemerintah atau lembaga tertentu. bantuan ini diberikan dalam bentuk uang atau fisik, tergantung pada kemampuan keuangan daerah atau lembaga. Tujuannya untuk membantu tercapainya tujuan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan menganut asas keadilan, martabat, akal sehat, dan manfaat bagi masyarakat (Suprpto, Edora, and Pasaribu 2024)

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 menjelaskan bahwa persyaratan berikut ini harus dipenuhi untuk penyediaan bantuan sosial:

1. Selektif, artinya bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima bantuan yang dimaksudkan untuk melindungi mereka dari potensi risiko sosial.
2. Memenuhi kualifikasi penerima bantuan sosial, yang meliputi penduduk di wilayah administratif pemerintah daerah dan memiliki identitas yang jelas.
3. Bersifat sementara dan tidak berkesinambungan, dengan kemungkinan pengecualian pada beberapa situasi yang mungkin tahan lama. d.Sesuai dengan tujuan penggunaan, karena tujuan pemberian bantuan sosial mencakup pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Bantuan sosial merupakan sebuah karakteristik negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan berupa sandang, pangan maupun papan. Pemberian bantuan sosial diharapkan masyarakat miskin dapat bertahan dari berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi serta dapat bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu, bantuan sosial merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang memandang bahwa masyarakat miskin mempunyai kesetaraan dalam kemandirian dan kebebasan mengakses sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Teguh 2020)

Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan atau disebut e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Nurafia, Yulianti, and Arenawati 2020)

Program BPNT juga merupakan program kerjasama antara kementerian dan lembaga negara, bank Indonesia, serta otoritas jasa keuangan. Dengan dilaksanakannya program BPNT maka dikeluarkanlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang mana kartu tersebut diberikan ke KPM untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mempunyai fitur uang elektronik serta tabungan sehingga dapat dijadikan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Besaran manfaat yang diterima oleh KPM dalam program BPNT pada mulanya senilai Rp 110.000.-kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000.-dan sekarang ini sebesar Rp 200.000./KPM/bulan yang mana tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai kebutuhan di E-warong (Agustina and Megawati 2022)

Etnometodologi

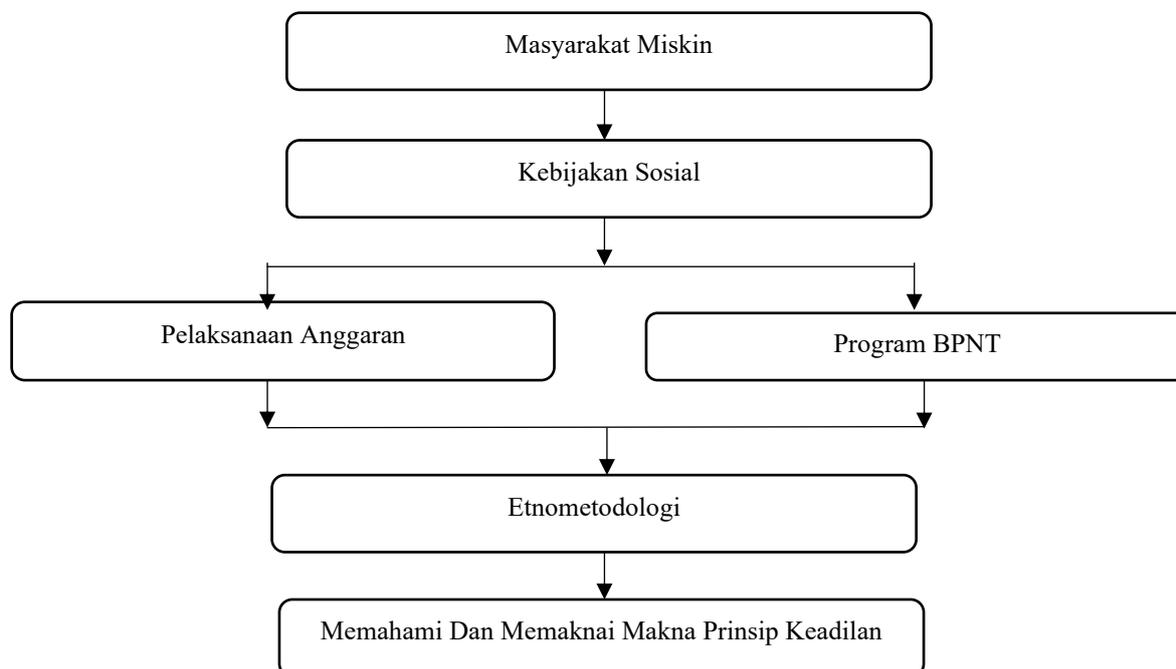
Etnometodologi adalah subjek yang cerdas dan kreatif mempertahankan, mengembangkan, dan memproduksi tindakan struktur sosial. Pengetahuan aktor dapat menjadikan sebagai prosedur dan cara dalam menjelaskan dunia sosial. Posisi struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani aktor adalah tidak bekerja belakang aktor melainkan dikonstruksikan melalui tindakan aktor. Etnometodologi adalah metode empirik untuk mempelajari konstruksi realitas yang dilakukan individu dalam proses interaksi sosial (Rahmasari and Wahyudi 2020).

Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari pengamatan peneliti mengenai BPNT yang ada di Desa Mensung. Dilihat dari amatan peneliti, masih banyak masyarakat miskin di Desa Mensung yang tidak menjadi penerima BPNT. Selain melihat dari ketepatan sasaran, peneliti juga ingin mengkaji mengenai pemanfaatan pangan yang dibagikan kepada masyarakat, baik dari segi kualitas pangan ataupun kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun sebagian besar KPM tidak memperhatikan nilai barang yang diterima dan pelaksana program tidak memberikan perincian nilai barang yang diberikan. Hal ini lah yang dapat menimbulkan banyak spekulasi miring dan rentannya tindakan penyelewengan. Pemanfaatan BPNT seharusnya memberikan dampak serta manfaat yang sangat berarti bagi setiap masyarakat yang ada, agar supaya masyarakat bisa merasakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik dan adil.

Permasalahan yang telah dipaparkan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan makna prinsip keadilan dalam pelaksanaan BPNT di Desa Mensung. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan alasan makna yang terkandung didalam subjek dapat dipahami oleh peneliti apabila mendengarkan secara langsung. Metode kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dalam peristiwa interaksi serta tingkah laku manusia dalam kondisi tertentu. Fokus penelitian dengan melihat pelaksanaan anggaran BPNT di Desa Mensung. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi yang merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena dapat membongkar makna yang tersembunyi dalam ekspresi simbolis aktor sosial atau ekspresi indeksikal dalam pelaksanaan anggaran BPNT.

Kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif dan pendekatan etnometodologi didalamnya. Hal ini didukung oleh data lapangan yang dianggap cukup memadai dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan gambaran serta penjelasan tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab beberapa permasalahan yang muncul di bab awal penelitian ini. Melalui paradigma interpretatif peneliti akan melihat proses pelaksanaan anggaran program BPNT yang dilakukan oleh Desa Mensung.

Etnometodologi dipilih oleh peneliti dikarenakan dengan menggunakan metode tersebut dirasa dapat lebih cocok untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dituangkan pada setiap tahapan analisis yaitu indeksikalitas, reflektivitas, analisis anti kontekstual dan penyajian common sense knowledge of social structures. Seperti yang dijelaskan dalam Kamayanti (2016), studi etnometodologi adalah studi yang berfokus pada pencarian makna aktivitas keseharian yang disepakati oleh anggota komunitas. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana makna dan kebiasaan suatu individu dalam melakukan kegiatan yang akan diteliti. Sehingga dari tahapan analisis tersebut peneliti dapat memahami makna prinsip keadilan dalam pelaksanaan anggaran BPNT di Desa Mensung.

Lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah di Desa Mensung Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah Masyarakat miskin sebanyak 285 KK (kepala keluarga). Adapun jumlah masyarakat penerima bantuan BPNT adalah sebanyak 254 KPM.

Tabel 1. Perbandingan Masyarakat Miskin dan Penerima Bantuan

No	Desa	Jumlah Masyarakat Miskin	BPNT	
			Menerima	Tidak Menerima
1.	Kotaraya	74	31	43
2.	Kayu Agung	86	41	45

No	Desa	Jumlah Masyarakat Miskin	BPNT	
			Menerima	Tidak Menerima
3.	Mensung	103	47	56
4.	Ogomolos	115	65	50

Sumber : Data Penerima BPNT Tahun 2023 di Kecamatan Mepanga

Jika dilihat dari data yang diperoleh peneliti, Desa Mensung merupakan Desa dengan jumlah masyarakat tidak menerima BPNT paling banyak dibandingkan desa lain dan jumlah masyarakat miskin kedua terbanyak setelah ogomolos.

Lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah di Desa Mensung Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah Masyarakat miskin sebanyak 285 KK (kepala keluarga). Adapun jumlah masyarakat penerima bantuan BPNT adalah sebanyak 254 KPM.

Tabel 2. Perbandingan Masyarakat Miskin dan Penerima Bantuan

No	Desa	Jumlah Masyarakat Miskin	BPNT	
			Menerima	Tidak Menerima
1.	Kotaraya	74	31	43
2.	Kayu Agung	86	41	45
3.	Mensung	103	47	56
4.	Ogomolos	115	65	50

Sumber : Data Penerima BPNT Tahun 2023 di Kecamatan Mepanga

Jika dilihat dari data yang diperoleh peneliti, Desa Mensung merupakan Desa dengan jumlah masyarakat tidak menerima BPNT paling banyak dibandingkan desa lain dan jumlah masyarakat miskin kedua terbanyak setelah ogomolos.

Informan penelitian mencakup 3 orang penerima BPNT, kepala desa Mensung, pengelola e-warung dan pendamping penerima BPNT. Pemilihan informan berdasarkan keikutertaan aktif sebagai pihak yang berkepentingan dan berhubungan langsung dalam aktivitasnya.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan tahap analisis yang mengikuti kaidah dalam etnometodologi Garfinkel (1967) dalam Kamayanti (2016) menetapkan tiga tahap analisis. Tahap pertama pencarian indeksikalitas, reflektivitas yang melandasi aksi praktis, dan pencapaian aksi kontekstual yang dapat dianalisis. Berikut tahap analisis :

Indeksikalitas

Indeksikalitas merupakan proses menangkap sebuah informasi dengan menggambarkan bentuk simbolik, ujaran, ekspresi, gerakan dan aturan yang mengandung suatu ketidaksempurnaan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di saat wawancara dilaksanakan.

Refleksivitas

Refleksivitas disini merupakan tahapan lanjut dari indeksikalitas. Pada saat mengindeksikan hasil penelitian reflektivitas juga sudah dapat dilakukan akan tetapi tahap ini dianggap tahap kelanjutan yang berurutan yaitu peneliti mengindeksikan terlebih dahulu kemudian merefleksikan apa yang sudah di indeksikalitaskan. Pada tahap ini peneliti menjelaskan serta menginterpretasikan hasil penelitian yang kebanyakan dari hasil wawancara mendalam juga dari hasil observasi dan dokumentasi.

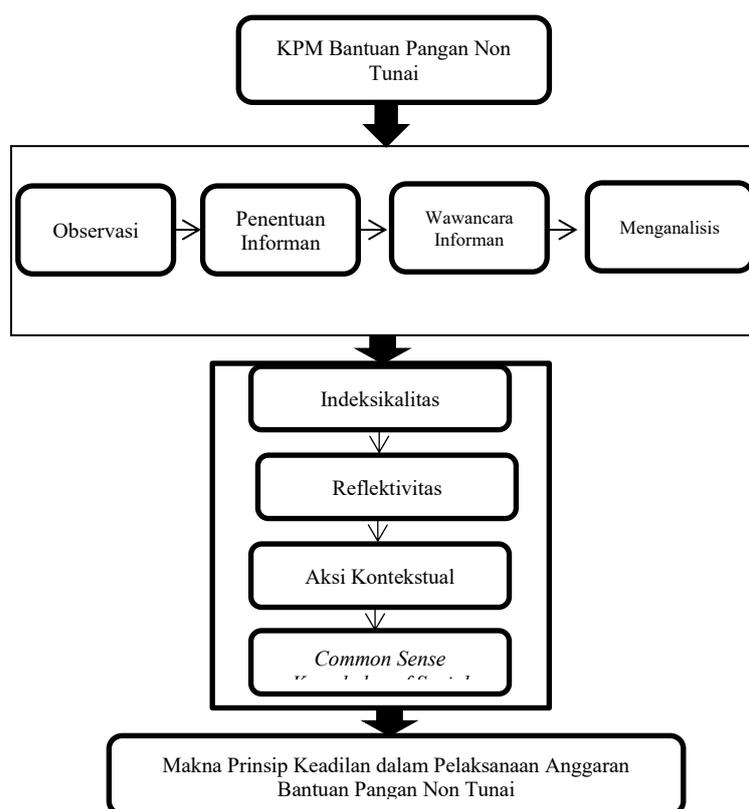
Analisis Aksi Kontekstual

Setelah melakukan indeksikalitas dan reflektivitas peneliti kemudian berusaha menganalisis hasil temuan peneliti dan meng-highlight tindakan-tindakan yang dilakukan informan sehingga menjadi hal yang menarik untuk di perhatikan. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penelitian

ini, dimana peneliti mencoba untuk memahami maksud dari informan tidak hanya apa yang dikatakan namun juga dari ekspresi dan perumpamaan yang disampaikan.

Common Sense Knowledge of Social Structures

Tahapan ini merupakan puncak dari penelitian etnometodologi, dimana tahap ini tidak hanya menggunakan etnometodologi sebagai pendekatan untuk memahami para informan namun juga sebagai landasan teori yang membawa peneliti pada pemahaman akhir dan menyimpulkan hasil penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat melihat bagaimana makna prinsip keadilan dalam pelaksanaan anggaran BPNT di Desa Mensung.



Gambar 2. Skema Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Mensung

Desa Mensung berawal dari program transmigrasi dari pemerintah pusat pada tahun 1974, yang terdiri dari 500 kepala keluarga dengan jumlah lahan sawah 1 Ha per kepala keluarga dan 1 Ha diperuntukan pekarangan dan kebun, wilayah ini masih hutan belantara dengan kayu-kayu besar, rotan dan tumbuh-tumbuhan lain. Wilayah transmigrasi tersebut belum dinamakan Desa tetapi dinamakan Unit 2 Ongka Malino yang dipimpin oleh kepala proyek bernama Husni Ibrahim. Pada tahun 1979 Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan daerah transmigrasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Donggala sehingga atas perintah Bupati Donggala nama Unit 2 (dua) segera diganti dengan nama Desa. Atas kesepakatan para tokoh yang ada di wilayah ini mendapat kesimpulan bahwa sesuai dengan keadaan wilayah maka Desa tersebut dinamakan Desa Mensung. Harapan masyarakat dengan nama itu Desa Mensung menjadi Desa yang berkembang, maju dan menjadi Desa yang besar dan mampu bersaing dengan Desa di sekitar yang lebih dulu ada.



Keadaan Sosial Masyarakat

Dalam penelitian ini mengenai kondisi ekonomi masyarakat bahwa mayoritas penduduk di Desa Mensung berprofesi sebagai petani dan pekebun. Secara keseluruhan dalam proses pekerjaannya masyarakat menggunakan peralatan modern seperti traktor untuk membajak sawah. Kemudian potensi hasil pertanian dan kebun mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Desa Mensung sendiri ada beberapa masyarakat yang memulai bisnis rumahan yaitu membuat kripik berbahan dasar singkong dan ubi jalar, yang bahannya didapat dari hasil tani sendiri. Dengan adanya industri rumahan tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga menambah peluang kerja untuk ibu-ibu yang mengangur di rumah. Mengenai akses pemasaran dari hasil pertanian dan industri rumahan tersebut sudah cukup baik, sehingga hasil potensi pertanian mampu melepaskan masyarakat dari masalah problem kemiskinan.

Visi dan Misi

Visi: Desa Mensung yang mandiri dan sejahtera

Misi

1. Mewujudkan pemerintah Desa yang tertib dan berwibawa
2. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

Dalam penelitian ini mengenai kondisi ekonomi masyarakat bahwa mayoritas penduduk di Desa Mensung berprofesi sebagai petani dan pekebun. Secara keseluruhan dalam proses pekerjaannya masyarakat menggunakan peralatan modern seperti traktor untuk membajak sawah. Kemudian potensi hasil pertanian dan kebun mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Desa Mensung sendiri ada beberapa masyarakat yang memulai bisnis rumahan yaitu membuat kripik berbahan dasar singkong dan ubi jalar, yang bahannya didapat dari hasil tani sendiri.

Dengan adanya industri rumahan tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga menambah peluang kerja untuk ibu-ibu yang mengangur di rumah. Mengenai akses pemasaran dari hasil pertanian dan industri rumahan tersebut sudah cukup baik, sehingga hasil potensi pertanian mampu melepaskan masyarakat dari masalah problem kemiskinan.

Aspek Kesesuaian Distribusi

Distribusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem ekonomi dan administrasi publik yang berhubungan dengan proses penyaluran bantuan pangan non tunai. Pada program bantuan pangan non tunai distribusi merujuk pada proses penyaluran bantuan dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui mekanisme non tunai yang disalurkan lewat e-warong. Distribusi berkaitan dengan siapa saja yang menjadi penerima dalam bantuan. Desa mensung menjadi salah satu Desa yang menerima distribusi bantuan dari pemerintah terhitung sejak tahun 2017 dengan jumlah penerima sebanyak 47 KPM. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Mensung, Bapak Toni Iskandar dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Mensung sudah berjalan sejak tahun 2017. Alhamdulillah sudah sangat baik dari segi pelaksanaan, apalagi di Desa ini masih banyak warga yang berhak mendapatkan bantuan. Dan BPNT sudah tepat sasaran bagi sebagian orang dan perlu ditinjau kembali atau survei kembali penerima manfaat jangan sampai masyarakat yang telah sejahtera masih menerima bantuan”

Penjelasan Bapak Toni Iskandar (Kepala Desa Mensung) secara empiris menggambarkan keberadaan dan kedudukan program pangan non tunai (BPNT) sebagai langkah strategis memenuhi

taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Penekanan bagi program BPNT seyogyanya mengupdate data baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sekiranya tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Tri dalam wawancara

Selaras dengan yang diungkapkan pendamping dalam proses wawancara yakni sebagai berikut:

"Kasihnak, tetangga saya hidup nya susah, tapi tidak dapat bantuan. Sedangkan yang rumah nya gedong malah dapat, bingung saya aturan nya bagaimana."

Dalam wawancara diatas menunjukkan adanya kebingungan KPM terhadap aturan dari pemerintah terkait penerima bantuan. Masyarakat cenderung melihat sisi kesetaraan melalui praktik sosial kehidupan sehari-hari, sementara bagi pendamping hal itu diatur dan dikeluarkan oleh pusat. Hal ini dipertegas oleh pendamping dalam wawancara, dikatakan sebagai berikut:

"Banyak ibu-ibu yang bertanya dan komplain kepada saya selaku pendamping, bahwa kenapa mereka yang kurang mampu tidak mendapat bantuan BPNT, tetapi ada orang yang sudah mampu atau dikatakan sejahtera dapat bantuan BPNT mereka kira pendamping BPNT yang menentukan siapa-siapa yang mendapat bantuan padahal itu bukan, karena kita pendamping hanya mendapat data atau nama-nama itu dari PUSDATIN"

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa terkait permasalahan penerima bantuan BPNT ini bukan tugas pendamping, melainkan data yang didapat dari pusat. Data tersebut berasal dari data warga miskin yang sudah diolah lembaga resmi bernama PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) untuk kriteria ketepatan sasaran BPNT bahwasanya yang berhak dapat yaitu keluarga miskin atau rentan miskin yang namanya terdaftar di pusat, dan kemudian memiliki komponen-komponen kepesertaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan itu, Bapak Toni Iskandar (Kepala Desa Mensung) mengatakan bahwa:

"Saya dan pendamping BPNT berusaha memaksimalkan siapa saja yang boleh menerima bantuan, saya dan pendamping BPNT terkadang melakukan rapat internal khusus membahas masalah penerima BPNT"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi sentral kekuatan dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Perhatian dan kerja sama yang dikehendaki dalam pelaksanaan program yaitu instrumen pemerintah dari tingkatan pusat hingga tingkat pedesaan secara vertikal struktural. Hal ini menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar masyarakat tidak merasa adanya kesenjangan seperti yang disampaikan oleh penerima manfaat KPM yakni ibu Sumini dalam wawancara mengatakan bahwa:

"Itu kayak ibu D, rumahnya gedong, koyok ora pantes entok bantuan, sakjane pemerintah iki piye to" (itu kayak ibu D, rumahnya gedong, kayak tidak pantas dia dapat bantuan, sebenarnya pemerintah ini bagaimana kah)

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa melihat keadilan bukan hanya siapa yang terdata sebagai penerima, tetapi siapa yang "pantas" dan "lebih membutuhkan" menurut penilaian bersama. Warga menunjukkan bahwa keadilan menurut mereka bersifat moral dan kasat mata. Ketika penerima BPNT dianggap "tidak layak", munculah tekanan sosial yang mengganggu stabilitas komunitas, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap aparat desa. Pemikiran ini dibantah oleh aparat desa yakni Kepala Desa Mensung menyampaikan dalam wawancara bahwa:

"Kami hanya melanjutkan data dari pusat. Kalau ada yang tidak sesuai, kami usulkan revisi, tapi prosesnya lama. Kadang juga, kalau langsung diganti, warga protes, akan tetapi sejauh ini respon KPM terpantau bagus karena manfaat nya dapat dirasakan"

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa tanggapan para KPM BPNT mengenai bantuan ini sangat baik karena bermanfaat bagi keberlangsungan hidup sehari-hari mereka dan meringankan beban mereka tiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sumini selaku penerima manfaat, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

"Bantuan yang diberikan berupa sembako yang sudah dipaketkan. Saya tidak tau betulkah itu kalau ditotalkan harga nya Rp. 200.000,- karena tidak dikasih struk."

Dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa bantuan sembako yang diterima KPM seringkali sudah dalam bentuk paket jadi (paketan), tanpa disertai rincian harga atau nilai dari masing-masing

komoditas didalamnya. Hal ini menyebabkan KPM tidak mengetahui apakah nilai bantuan yang diterima sesuai dengan jumlah nominal bantuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penjelasan ini juga dijelaskan oleh Ibu Tri dalam wawancara sebagai berikut:

"saya hanya terima saja, isinya kadang beras, telur, sayur. Tapi saya tidak tahu itu totalnya berapa. Kadang merasa barang nya sedikit, tapi saya tidak berani tanya sama agen, mungkin agen sudah atur seperti itu, jadi ya sudah."

Dalam wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan informasi antara penyedia bantuan (e-warong) dengan penerima bantuan (KPM). Hal ini juga menjelaskan bahwa e-warong memang tidak memberikan struk sehingga KPM hanya bisa menebak-nebak berapa jumlah harga nya. Sesuai dengan penjelasan diatas, e-warong dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

"Kami tidak punya niat menutup-nutupi harga. Kami hanya melayani sesuai sistem. Barang sudah kami siapkan, supaya tidak menumpuk antrean. Kalau harus satu-satu memilih, nanti jadi ribet dan waktu tidak cukup."

Wawancara diatas menjelaskan bahwa mereka tidak mencoba mengelabui KPM dengan tidak memberikan struk. Mereka menjelaskan bahwa pihak agen hanya mengikuti instruksi dari pihak atas, baik dari dinas sosial maupun bank penyalur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh agen e-warong Bapak Lutfi, dalam wawancara sebagai berikut:

"Tidak ada aturan dari atas harus ada struk, kalau ada yang tanya saya jelaskan, tapi semua harga barang sudah sesuai dengan yang ditetapkan dari atas. Kami juga diburu waktu apalagi jika ada keterlambatan dari tanggal penyaluran, otomatis kami harus bekerja ekstra agar segera tersalurkan"

Wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa agen mengklaim harga barang yang disalurkan sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh supplier dan dinas terkait. Namun mereka mengakui bahwa belum ada mekanisme yang mewajibkan mereka membuat struk atau rincian harga kepada KPM, kecuali diminta secara langsung.

Tabel 3. Indeksikalitas, Reflektivitas, dan Aksi Kontekstual Aspek Distribusi

No	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual
1	Masyarakat melakukan komplain kepada pendamping	Laporan mengenai ketidaktepatan penerima bantuan segera di proses oleh pendamping BPNT dengan membicarakan masalah tersebut kepada Aparat Desa Mensung	Melakukan koordinasi bersama aparat Desa Mensung
2	Tidak ada nya rincian harga untuk setiap barang yang diterima	Tidak ada mekanisme yang mengatur mengenai struk sehingga agen e-warong berkewajiban memberikan struk kepada PKM	menjelaskan secara langsung kepada masyarakat yang bertanya

Aspek Prosedur

Aspek prosedur merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Prosedur yang dimaksud meliputi mekanisme penetapan penerima, proses pencairan dana, penukaran saldo bantuan dengan bahan pangan melalui e-warong, serta sistem pengaduan dan monitoring. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, kejelasan dan keterbukaan prosedur sangat mempengaruhi terciptanya rasa keadilan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Para KPM BPNT di Desa Mensung pertama kali mengetahui adanya program bantuan BPNT ini dari pemerintah desa melalui undangan yang dibagikan. Hal ini diketahui dari salah satu KPM yaitu ibu Sumini yang mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

"Saya didatangi kerumah oleh pegawai desa, dibilang besok datang kekantor desa buk ya, mau dapat bantuan. Pulang dari sana sebulan kemudian dibagikan kartu itu yang digesek, habis itu tidak ada lagi informasi sosialisasi apa-apa, yang saya tau dapat bantuan uang yang ditukar sama beras itupun kadang datang nya lambat"

Wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan BPNT yang dilakukan oleh Aparat Desa dan Pendamping. Tidak adanya sosialisasi secara berkala. Akibatnya, KPM tidak mengetahui sistematis pembagian BPNT, apa saja yang didapatkan, boleh ditukar dengan bahan harian yang dibutuhkan. Hal ini juga diungkapkan oleh pendamping BPNT dalam wawancara, sebagai berikut:

"kami sebenarnya ingin memberikan sosialisasi secara menyeluruh ke semua KPM, tapi karena banyak kegiatan lain, akhirnya hanya bisa lewat kepala dusun atau informasi lisan ke KPM saat pembagian. Jadinya, ya kadang banyak KPM yang bingung soal prosedur atau isi bantuan,"

Wawancara diatas menyatakan bahwa keterbatasan waktu dan banyaknya tugas yang harus dikerjakan membuat proses sosialisasi belum dilakukan secara maksimal. Sosialisasi sering kali hanya dilakukan secara lisan ketika penyaluran bantuan akan dimulai atau melalui perangkat desa tanpa pertemuan resmi yang melibatkan seluruh KPM, sehingga KPM banyak yang bingung mengenai prosedur penyaluran BPNT.

KPM juga mengatakan bahwa adanya keterlambatan dalam penyaluran, hal ini diungkapkan Ibu Widi dalam wawancara sebagai berikut:

"Tiap bulan tanggal 17, tapi kadang lambat, kadang lambat 2 hari, kadang 3 hari, sampe kadang beras saya sudah habis tapi belum ada info penyaluran"

Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, mengakibatkan kebutuhan akan pangan tidak terpenuhi. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 17 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Pernyataan ini dibenarkan oleh pendamping BPNT, dalam wawancara menyatakan bahwa:

"Saya di lapangan cuma menunggu jadwal resmi dari pusat. Kalau pusat belum memberikan perintah pencairan, bank juga belum bisa transfer. Ini biasanya terjadi karena perubahan data atau revisi pada DTKS."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pendamping diperoleh bahwasannya keterlambatan penyaluran bantuan sering kali bukan berasal dari sistem lokal, melainkan dari mekanisme pusat, seperti keterlambatan transfer dari Kementerian Sosial, perubahan jumlah KPM akibat pemadanan DTKS, atau revisi data kependudukan. Masalah ini kembali ditegaskan oleh pendamping BPNT dalam wawancara, menyatakan bahwa:

"Saya sering dimarahi KPM. Padahal kami juga belum dapat info karena kurang nya komunikasi dari pusat, belum lagi masalah pembaruan data. Jadi saya harus sampaikan dan jelaskan dengan sabar."

Dalam wawancara diatas menyatakan bahwa pendamping sering menghadapi tekanan dari masyarakat yang meminta kepastian pencairan atau menuduh pendamping tidak bekerja dengan benar. Dalam posisi ini, pendamping sosial harus menjelaskan bahwa pendamping bukan pengambil keputusan, melainkan pelaksana teknis yang mengikuti instruksi dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Pendamping mengaku bahwa keterlambatan juga disebabkan oleh komunikasi yang belum optimal antara pusat dan daerah. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa dalam wawancara sebagai berikut:

"Kami pihak desa juga bingung, jujur yang pertama disalahkan itu kami, padahal dari pusat nya yang lambat. Jadi saya dan rekan-rekan juga ikut turun tangan membantu pendamping menginformasikan kepada KPM mengenai keterlambatan dengan menghubungi via wa/ telpon."

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak desa tidak terlibat dalam keterlambatan penyaluran bantuan. Mereka juga dibuat bingung oleh pemerintah pusat. Adapun langkah yang diambil oleh pemerintah Desa adalah dengan menghubungi KPM lewat WhatsApp. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Widi dalam wawancara sebagai berikut:

"Saya dapat informasinya telat nak, karena saya tidak punya WhatsApp. Jadi tetangga saya yang sampaikan"

Dalam wawancara ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang kurang efektif disebabkan karena adanya keterbatasan dari pihak KPM itu sendiri. KPM seringkali hanya menerima informasi secara lisan dari tetangga, perangkat desa, atau pendamping. Hal ini membuka ruang terjadinya salah paham atau penyimpangan informasi karena tidak adanya informasi tertulis atau resmi. Hal ini didukung oleh penjelasan dari pendamping BPNT dalam wawancara sebagai berikut:

"Saya selaku pendamping juga memiliki keterbatasan waktu jika harus disampaikan satu-persatu kerumah, jadi saya minta tolong saja kepada KPM terdekat untuk menyampaikan informasi. Menurut saya hal itu wajar dikampung, menyampaikan informasi dari mulut ke mulut."

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi bahwa pendamping mengakui keterbatasan adanya keterbatasan waktu jika informasi disampaikan dengan tatap muka. Akan tetapi jalan lain yang dipilih pendamping cukup berhasil yakni meminta bantuan kepada KPM lain yang jarak tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah KPM yang tidak memiliki WhatsApp.

Tabel 4 Indeksikalitas, Reflektivitas, dan Aksi Kontekstual Aspek Prosedur

No	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual
1	waktu penyaluran tidak tepat waktu	terjadinya perubahan data atau revisi pada DTKS di pusat yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat waktu sehingga aparat desa berupaya memfasilitasi dengan memberikan informasi kepada KPM dan berkoordinasi dengan pendamping.	Menyampaikan informasi melalui WhatsAap
2	Sosialisasi tidak dilakukan secara rutin	Sosialisasi tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu dan banyaknya tugas yang dikerjakan oleh pendamping sehingga sosialisasi hanya disampaikan secara lisan pada saat proses penyaluran bantuan dimulai.	Sosialisasi dilakukan secara lisan pada saat penyaluran

Aspek Interaksional

Aspek interaksional dalam konteks program BPNT merujuk pada dampak nyata atau luaran (outcome) yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah menerima bantuan pangan. Hasil ini dapat berupa perubahan kondisi ekonomi, peningkatan rasa aman dalam pemenuhan kebutuhan pokok, hingga dinamika sosial yang timbul setelah program dijalankan. Hal ini dipertegas oleh Ibu Sumini dalam wawancara sebagai berikut:

"Alhamdulillah, saya senang sekali nak. Kalau sudah tanggal 17 saya tidak perlu keluar uang untuk belanja, biasanya sehari minimal Rp.15.000,- lumayan lah bisa ngirit keuangan, paling tidak bisa irit uang sekitar 2 mingguan, itu saja sudah termasuk lumayan "

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya BPNT yang diberikan 1 bulan sekali ini dapat sedikit membantu meringankan perekonomian harian keluarga, karena bantuan yang diberikan secara non tunai yang berupa beberapa bahan pokok bisa disimpan di lemari pendingin hingga dapat digunakan untuk beberapa hari, sampai waktu penyaluran bulan selanjutnya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh, banyak dari masyarakat yang berpendapat bahwa bantuan yang disalurkan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sebulan penuh. Hal ini seperti yang sempat disampaikan oleh Ibu Tri, seorang buruh tani yang mengatakan bahwa:

"sekalipun hanya membantu dalam kurun waktu seminggu, tapi kami tetap syukuri itu. Saya pernah juga dikasih sayur dan tahu yang layu, buat saya itu mubazir, mending dikasih minyak, lebih dipake"

Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian KPM merasa bahwa bantuan sembako yang disalurkan kepada mereka tidak sesuai dengan yang

menjadi kebutuhan harian KPM, sehingga sembako yang mereka terima terkadang tidak dimanfaatkan sama sekali. Bahkan dari segi kualitas pun terkesan kurang diperhatikan. Ibu Sumini selaku penerima manfaat BPNT juga turut membenarkan hal tersebut melalui pernyataan sebagai berikut:

"Ya begitulah, kadang beras nya bagus kadang tidak, lebih bagus kualitas beras yang dari sawah saya. Jadi yang saya masak biasanya beras hasil sawah saya, beras bantuan saya pakai pakan ayam soalnya anak dan suami saya tidak suka, mereka bilang nasinya tidak enak"

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bantuan barang berupa beras yang diberikan terkadang didapati kualitas nya kurang baik. Beras yang mereka dapatkan dilahan pertanian sendiri jauh lebih baik daripada beras yang diterima dari program BPNT, sehingga ada beberapa KPM yang membuang beras secara cuma-cuma untuk dijadikan makanan ternak, bahkan KPM juga sempat melakukan protes kepada pihak e-warong, hal ini diketahui dari penyampaian yang disampaikan pihak agen e-warong yaitu bapak Lutfi yang dalam wawancara menyampaikan sebagai berikut:

"Ibu-ibu banyak mengeluh ke saya katanya kenapa barang yang dikasih tidak bagus. Padahal kita belanja langsung dari grosir, kadang kalau sayur nya layu itu karena memang sudah semalam. Kita tidak sempat bongkar untuk sortir, kalau tidak cepat masyarakat bisa ribut"

Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa barang yang datang dalam jumlah besar membuat e-warong mengalami keterbatasan waktu dalam menangani barang yang datang. Dari temuan tersebut, dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara paket bantuan yang diterima dengan kebutuhan harian KPM merupakan salah satu penyebab adanya persepsi ketidakpuasan dan anggapan bahwa bantuan yang disalurkan tidak adil dan kurang bermanfaat.

Tabel 5. Indeksikalitas, Reflektivitas, dan Aksi Kontekstual Aspek Interaksional

No	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual
1	Masyarakat miskin yang tidak memenuhi bahan pangan harian	Pemerintah memberikan bantuan KPM dalam memenuhi kebutuhan harian serta berdampak pada peningkatan gizi masyarakat miskin.	Program BPNT untuk memenuhi kebutuhan BPNT

Nilai-nilai Dalam Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Mensung

Berdasarkan temuan penelitian di atas, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tahapannya yaitu sebagai berikut:

Peneliti melihat bahwasannya makna prinsip keadilan pelaksanaan BPNT dalam segi aspek distribusi ketepatan. Dalam konteks etnometodologi, makna keadilan dalam distribusi dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari KPM. KPM memaknai bantuan yang diterima bukan hanya sebagai barang, tetapi juga sebagai simbol perhatian atau ketidakpedulian pemerintah. Ketika bantuan datang terlambat, tidak sesuai, atau dipaksakan dalam bentuk paket tetap, maka distribusi itu dianggap tidak adil, meskipun secara prosedural sudah "sesuai aturan".

Peneliti melihat bahwasannya makna prinsip keadilan pelaksanaan BPNT dalam segi aspek prosedur mengandung nilai transparansi dan partisipasi. Keadilan juga dimaknai dari proses penyaluran bantuan, khususnya informasi dan pelibatan penerima. Transparansi tidak hanya soal ada atau tidaknya pengumuman, tapi apakah informasi tersebut sampai dan dipahami oleh KPM dalam konteks sosial mereka. Ketika KMP mengatakan "kami tidak tau, jadwal penyaluran sering berubah" mereka tidak hanya menyampaikan ketidaktahuan, tapi juga memaknai bahwa mereka diabaikan sebagai warga negara. Ketika informasi tidak jelas, konsekuensinya langsung terjadi

Peneliti melihat bahwasannya makna prinsip keadilan pelaksanaan BPNT dalam segi aspek hasil mengandung nilai manfaat bagi KPM, keadilan tidak dimaknai dari jumlah bantuan yang diterima, tetapi dari apakah barang tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa KPM menggunakan logika praktis dalam menilai adil atau tidaknya bantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa makna keadilan dibentuk dari pengalaman konkret sehari-hari. KPM tidak melihat bantuan sebagai "adil" hanya karena angkanya sama di sistem, melainkan apakah bantuan yang diberikan

benar-benar bermanfaat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna prinsip keadilan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan pendekatan etnometodologi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam program ini dimaknai secara berbeda oleh masing-masing aktor, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping sosial, pemerintah desa, e-warong, dan pihak penyalur. Secara umum, keadilan dimaknai melalui tiga aspek, yaitu: 1) Keadilan dimaknai sebagai kesetaraan berdasarkan kebutuhan, artinya bantuan dianggap adil jika diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan persepsi ketidakadilan akibat adanya penerima yang dianggap "tidak layak", serta keterbatasan data dan kurangnya sosialisasi. 2) Keadilan prosedural terlihat dari pelaksanaan yang mencerminkan transparansi, kemudahan, dan keterbukaan informasi. Namun, prosedur dalam penyaluran BPNT seringkali tidak berjalan sesuai harapan karena kurangnya sosialisasi, keterlambatan penyaluran, dan minimnya partisipasi KPM dalam proses penentuan isi paket bantuan. Sistem akuntansi berbasis kinerja belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga akuntabilitas program masih lemah. 3) Keadilan dari segi hasil tercermin dari sejauh mana bantuan memberi manfaat langsung kepada penerima. Sebagian besar KPM merasa bantuan bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi, namun ada keluhan terhadap kualitas barang dan ketidaksesuaian harga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hasil belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program BPNT belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang ideal karena masih terdapat kesenjangan antara prosedur, pelibatan aktor, dan hasil yang diterima. Makna keadilan dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman keseharian aktor-aktor sosial, serta bagaimana mereka menafsirkan kebijakan dan realitas sosial dalam konteks lokal

Penelitian menyarankan pada aktivitas operasional Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program BPNT di tingkat desa/kelurahan, khususnya dalam aspek distribusi dan pelibatan KPM. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai secara adil dan tepat guna.

Kemudian bagi Pendamping Sosial dan Petugas BPNT, diperlukan peningkatan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada KPM mengenai hak-hak mereka dalam program BPNT, termasuk informasi waktu penyaluran, jenis barang, dan mekanisme pengambilan. Pendamping juga perlu memastikan bahwa KPM diberi ruang untuk menyampaikan masukan tanpa rasa takut.

Serta kepada Pengelola E-Warong, disarankan untuk tidak memaketkan barang secara sepihak, tetapi melibatkan KPM dalam menentukan barang yang dibutuhkan sesuai saldo bantuan. Hal ini penting agar bantuan benar-benar bermanfaat dan tidak terbuang percuma.

Dan penelitian selanjutnya, dapat mengkaji aspek kebijakan dan regulasi, atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas program secara lebih luas, serta mengaitkannya dengan sistem akuntansi publik secara mendalam

REFERENSI

- Agustina, Dwita, and Suci Megawati. 2022. "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto." *Publika* 10 (1): 175–90. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44634>.
- Ahmadpour-Samani, Parto, Hosein Arman, Amirali Foukerdi, Abdollah Hadi-Vencheh, and Reza Kiani Mavi. 2022. "The Equity Theory: A Quantitative Perspective Using Data Envelopment Analysis." *RAIRO - Operations Research* 56 (5): 3711–32. <https://doi.org/10.1051/ro/2022178>.

- Anggraeni, Citra, Lili Erina, and Sofyan Effendi. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik Pada Organisasi Publik Di Era Pandemi Covid-19." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 1: 1–11. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>.
- Arianto, Debby, Sastro M. Wantu, and Yanti Aneta. 2021. "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (11): 1847–55. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i11.470>.
- Aryanti, L., Yamin, N. Y., Iqbal, M., & Yuniar, L. S. (2023, December). Effectiveness of Internal Control of Operational Assistance Funds School. In 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments Education and Green Economy (IICSSD EGE 2022) (pp. 105-112). Atlantis Press.
- Azhar, I., & Lubis, N. K. (2024). EFEKTIVITAS BLT DANA DESA DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 5(4), 235-249.
- Aziz, M. Amer Maulana, Bambang Irawan, and Nur Ariesanto Ramadhan. 2024. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PENERIMAAN BANTUAN BERAS MISKIN MENGGUNAKAN METODE WASPAS." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8 (4): 7362–67. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/10268>.
- Balqis, Adinda Syifa Dinarila, Iskatinah, and Wahyu Hariadi. 2020. "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan PERMENSOS RI NO.20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara." *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (1): 1–12. <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Dow, K. E., Askarany, D., Teklay, B., & Richter, U. H. (2021). Managers' perceptions of justice in participative budgeting. In *Advances in Management Accounting* (pp. 127-152). Emerald Publishing Limited.
- Ferry, L., & Ahrens, T. (2025). "A Practice of Fairness": Social Equity Budgeting in Freedom City. *Public Administration*.
- Fikri, Rijalul, Muhammad Faisal Amrillah, M Irfan Rosyadi, Syahrul Azam, and Fajar Asshiddiqy. 2023. "Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory." *Jurnal Niara* 16 (1): 20–27. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13238>.
- Garis, Regi Refian, and Linda Desfirani. 2021. "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19." *Musamus Journal of Public Administration* 4 (1): 47–56. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/3586/2071>.
- Hasimi, Diah Mukminatul. 2020. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1 (01): 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.
- Kamayanti, Ari. 2016a. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rmah Peneleh.
- . 2016b. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Edited by Aji Dedi Mulawarman. Yayasan Rumah Paneleh.
- Kohlmeyer III, J. M., Mahenthiran, S., Parker, R. J., & Sincich, T. (2014). Leadership, budget participation, budgetary fairness, and organizational commitment. In *Advances in accounting behavioral research* (pp. 95-118). Emerald Group Publishing Limited.
- Lingtias, I., & Yamin, N. Y. (2024). MENAKAR KEPERCAYAAN PUBLIK: ANALISIS PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 184-199.
- Mangile, A. S., Yamin, N. Y., Iqbal, M., & Ansar, M. (2023, December). Symbolic Interaction in the Implementation of the Village Fund Budget. In 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments Education and Green Economy (IICSSD EGE 2022) (pp. 307-313). Atlantis Press.
- McDonald, B. D., & McCandless, S. (2021). Incorporating social equity. *Teaching Public Budgeting and Finance*, 236-256.
- Muttaqin, Alfin, and Ismail Ismail. 2023. "Kemiskinan Kultural Masyarakat Nelayan Di Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 4 (2): 279–92. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i2.2815>.
- Nurafia, Anggita, Rina Yulianti, and Arenawati Arenawati. 2020. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non

- Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya.” JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) 4 (2): 780–92. <https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709>.
- Parker, R. J., Kohlmeyer III, J. M., Mahenthiran, S., & Sincich, T. (2014). Procedural justice and information sharing during the budgeting process. In *Advances in Management Accounting* (pp. 93-112). Emerald Group Publishing Limited.
- Primanto, A., & Sos, S. (2023). Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Zahira Media Publisher.
- Putra, Robi Eka, Roni Ekha Putera, and Desna Aromatica. 2022. “Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT Melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia Di Kota Padang.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10 (2): 266–80. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>.
- Rahmasari, Shofiyyah, and Ari Wahyudi. 2020. “Kajian Etnometodologi Calon Santri Di Sigor Surabaya.” *Jurnal Paradigma*, no. Zakarsyi: 1–20.
- Saadah, N., & Nugroho, G. W. (2023). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BAHAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KELURAHAN SURADE. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 4(2), 159-167.
- Soleimani, M. M., Shahrabi, M. A., Fard, A. S., & Mohebi, S. (2024). Identifying the Dimensions, Components, and Indicators of the Economic Justice Model in Iran's Budgeting System. *Journal of Resource Management and Decision Engineering*, 3(4), 66-74.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Suprpto, Edora Edora, and Firentus Agustone Pasaribu. 2024. “Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Program Bantuan Sosial (BANSOS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW).” *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4 (1): 188–97. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1057>.
- Suryawan, B. P., Paranoan, S., Yamin, N. Y., & Iqbal, M. (2025). The Influence of Village Apparatus Competence, Clarity of Budget Targets, Internal Control System and Siskeudes on Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(1), 61-72.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1-10.
- Teguh, Kurniawan. 2020. “Efektivitas Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT) Di Kabupaten Bogor.” *Jurnal Analis Kebijakan* 4 (1).
- Timon, Andros. 2021. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6 (2): 160–74. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>.
- Widiati. 2023. “The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program Implementation As an Effort To Handle the Proverty in Panyipatan Village Panyipatan Sub-District Tanah Laut District.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 7 (1): 81–89. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.724>.